

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh provinsi di Indonesia. Seringkali, kemiskinan hanya dipahami sebagai indikasi rendahnya kesejahteraan, padahal sebenarnya, masalah ini bersifat lebih kompleks. Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam bidang sosial ekonomi, dengan kemiskinan sebagai salah satu masalah utamanya. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah merumuskan kebijakan-kebijakan khusus. Salah satu langkah yang diambil adalah meluncurkan program-program pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan. Sebagai negara berkembang, tantangan di bidang sosial ekonomi, khususnya kemiskinan, membutuhkan strategi yang komprehensif. Oleh karena itu, pemerintah memperkenalkan pendekatan berbasis rumah tangga melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimulai pada tahun 2017.

Salah satu program bantuan sosial utama pemerintah Indonesia, Program Keluarga Harapan (PKH), bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui bantuan tunai bersyarat (Conditional Cash Transfer). Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan keuangan kepada keluarga dengan disabilitas berat (RTSM) dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan aspek perawatan kesehatan lainnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa keluarga miskin dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk keluar dari siklus kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di desa-desa di mana akses terhadap layanan dan fasilitas dasar seringkali terbatas. Tujuan PKH adalah untuk memberikan bantuan langsung bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam hal kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program ini memiliki Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang terus muncul saat menerapkan PKH di desa. Ini termasuk kekurangan infrastruktur, hambatan dalam penyebaran bantuan, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan dan prosedur program. Menurut beberapa penelitian, PKH telah berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di desa. Namun, temuan ini sangat bergantung pada seberapa efektif program tersebut dilaksanakan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, PKH dapat menjadi alat yang kuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kemiskinan struktural, dan memberikan kemandirian ekonomi bagi keluarga yang rentan, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial RI (Kemensos), menangani kemiskinan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan bagi usaha kecil. Salah satu program berbasis bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2017 pasal 2, PKH merupakan program pemberian

bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Untuk menerapkan PKH di Desa Selur, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, mulai dari mengupdate data penerima manfaat, menyebarkan bantuan, dan mendampingi untuk memastikan bahwa bantuan digunakan untuk tujuan yang diinginkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan, tetapi ada masalah dengan pengawasan dan pendampingan yang konsisten. Namun, bukti menunjukkan bahwa ada penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan sosial, termasuk PKH, yang bertentangan dengan tujuan awal program. Lebih dari 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial diidentifikasi juga bermain judi online, menurut laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa uang bantuan negara tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin, tetapi malah dialihkan ke aktivitas negatif seperti perjudian online. Selain itu, ini menunjukkan adanya ketidaktepatan sasaran serta kemungkinan penyalahgunaan sistem bantuan negara.

Kasus nyata seperti penghentian bantuan PKH kepada keluarga penerima manfaat (KPM) karena indikasi penggunaan dana bantuan untuk judi online juga dilaporkan di tingkat desa, menunjukkan bahwa fenomena

penyalahgunaan ini terjadi tidak hanya dalam data statistik tetapi juga dalam praktik administrasi pemerintah di tingkat lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia secara keseluruhan mengalami penurunan baik dalam jumlah maupun persentase antara Maret 2010 dan Maret 2021. Namun demikian, terdapat beberapa bulan di antaranya yaitu pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020, di mana terjadi peningkatan jumlah dan persentase masyarakat miskin. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak pada September 2013 dan Maret 2015, serta pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020 dan September 2020.

Untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah Indonesia yang memberikan bantuan keuangan kepada keluarga yang sangat miskin dengan beberapa syarat, termasuk peningkatan kuantitas sumber daya manusia.

Tujuan utama dari PKH adalah menaikkan ketersediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial untuk keluarga miskin sehingga kualitas hidup mereka meningkat. Dalam waktu singkat, PKH diharapkan bisa membantu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, sedangkan dalam jangka panjang, program ini diharapkan bisa memberantas kemiskinan dengan menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta menaikkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya PKH,

diharapkan masyarakat bisa memperoleh peluang untuk menaikkan kualitas hidup mereka dan mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kriteria tersebut mencakup kondisi seperti memiliki ibu hamil, bayi baru lahir, atau bayi yang baru melahirkan, memiliki anak di bawah usia lima tahun atau antara usia 5- 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar, serta memiliki anak di bangku sekolah dasar dan tingkat SMP yang berusia antara 5-7 atau 15-18 tahun dan belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Program ini bertujuan untuk menyerahkan perlindungan sosial berupa bantuan pendidikan dan kesehatan kepada mereka yang memenuhi kriteria tersebut (Liahati & Larasati, 2019).

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam rangka menciptakan masyarakat yg makmur, adil dan beradab, sesuai dengan cita-cita negara yg tertulis dalam UUD 1945, dengan harapan setiap masyarakat mendapatkan keadilan sosial yang sama rata dalam kehidupan berbangsa dan negara untuk mencapai kemakmuran bersama.

PKH merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia yang ditujukan kepada masyarakat miskin dengan istilah keluarga penerima manfaat (KPM). PKH yang merupakan salah satu program bantuan bersyarat diharapkan dapat disalurkan dengan tepat sasaran, fasilitas yang diperoleh antara lain fasilitas kesehatan, fasilitas

pendidikan serta difabilitas dan juga masyarakat atau anggota keluarga 1 yang berumur usia lanjut dengan mebantunya mempertahankan taraf kesejahteraan seperti yang telah disampaikan pada Nawacita Presiden.

Data penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) menjadi sorotan masyarakat, pasalnya, banyak ditemukan orang kaya yang menjadi penerima manfaat program. Sebaliknya masyarakat miskin yang berhak belum bisa menikmati keberadaan program. Banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang dulunya masuk kategori tidak mampu sekarang mengalami peningkatan status ekonomi. Namun mereka masih terdata sebagai penerima manfaat. Hal tersebut juga dibenarkan oleh salah satu warga penerima bantuan PKH yang kini telah mengalami peningkatan ekonomi. Seharusnya pemerintah melakukan sistem pendataan secara akurat dan tepat bagi penerima PKH agar bantuan tersebut tepat pada Sasarannya yaitu masyarakat miskin. Masyarakat juga harus ikut melaporkan dan mengawasi jalannya pendataan masyarakat penerima.

Uraian penulis di atas menunjukkan adanya kecenderungan untuk melakukan penelitian tentang implementasi program bantuan PKH. Peneliti terdorong untuk meneliti topik ini lebih lanjut dengan judul penelitian.

**“ANALISIS PENYALAHGUNAAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK JUDI ONLINE DI DESA SELUR KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN PONOROGO**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan informasi yang diberikan di bagian latar belakang sebelumnya, penulis mengartikulasikan penggambaran masalah dengan cara selanjutnya:

1. Bagaimana model penyalahgunaan dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan untuk kegiatan judi online oleh masyarakat di desa Selur?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan bantuan PKH untuk judi online, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di desa Selur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan permasalahan yang ada, maka riset ini bertujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta mekanisme penyalahgunaan dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang digunakan untuk kegiatan judi online di desa.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan bantuan PKH untuk judi online serta menganalisis dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat di desa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan akademis bagi mahasiswa dan masyarakat luas, meliputi aspek teoritis dan praktis. yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bisa diartikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara teratur dengan tujuan mencapai hasil yang diharapkan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil dari studi khusus ini sangat dinantikan dalam komunitas akademik. Dalam praktiknya, Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah usaha dalam mengatasi kemiskinan dan menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bisa menyerahkan sumbangsih bagi pengembangan PKH agar lebih maju dan bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat.

### **E. Penegasan Istilah**

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas dan meningkatkan pemahaman pembaca tentang konsep-konsep kunci yang dijelaskan dalam penelitian ini.:

#### **1. Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi di mana individu atau kelompok dalam suatu masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, maupun lingkungan, sehingga tercipta kehidupan yang layak, adil, dan seimbang. Kesejahteraan masyarakat mencakup aspek material, seperti pendapatan dan akses terhadap layanan publik, serta aspek non-material, seperti keamanan, kebahagiaan, dan kualitas hubungan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering melibatkan kebijakan

publik, program pembangunan, serta inisiatif pemerintah dan lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.

## 2. PKH

Program Keluarga Harapan adalah sebuah program yang menyerahkan bantuan keuangan kepada keluarga yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Program ini adalah bagian dari usaha penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 2018. Tujuan dari program ini adalah untuk menaikkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

### F. Landasan Teori

#### 1. Implementasi Kebijakan

Gagasan implementasi kebijakan mencakup berbagai sudut pandang yang beragam, membuatnya sulit untuk menetapkan batas-batasnya secara meyakinkan. Sebagaimana dibuktikan dalam kamus Webster Wahab (2005), kompleksitas ini menggaris bawahi sifat konsep yang beragam, implementasi dijelaskan sebagai *"to provide means for carrying out"* (menyediakan untuk melakukan sesuatu); *"to give practical effect to"* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Dari definisi ini, implementasi merupakan aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana seperti undang-undang, peraturan pemerintah, pedoman pelaksanaan, sumber daya, dan lain-lain, untuk mencapai dampak atau akibat tertentu.

Menurut Anderson (dalam Islamy, 1996), kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memecahkan masalah tertentu, yang dilakukan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku. Sedangkan menurut Menurut Carl Friedrich (wahab, 2008), kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diajukan oleh individu, organisasi, atau badan pemerintah dalam pengaturan tertentu. Ini melibatkan identifikasi tantangan dan keadaan menguntungkan yang dapat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang dinyatakan.

Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk menangani masalah-masalah publik, Langkah-langkah peraturan, termasuk undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan daerah, digunakan untuk menetapkan kerangka kebijakan melewati tahapan yang panjang, dikenal sebagai siklus kebijakan (*policy cycle*), di mana Implementasi kebijakan adalah fase penting dalam proses siklus tersebut (Muhammad Shindid Muhaimin, 2022).

Kebijakan implementasi terdiri dari beberapa jenis: kebijakan makro yang ditetapkan oleh undang-undang seperti UU Nomor 10 Tahun 2004; kebijakan messo atau menengah yang diatur oleh peraturan menteri, gubernur, bupati, dan walikota; dan kebijakan mikro yang mengatur pelaksanaan kebijakan di tingkat operasional yang lebih rinci. Secara keseluruhan, kebijakan publik adalah komponen penting dari

struktur negara, yang mencapai tujuan melalui berbagai tingkatan keputusan dan implementasi.

Berikut adalah beberapa pendekatan dalam implementasi kebijakan:

- 1) Pendekatan Struktural, Pendekatan ini menekankan pentingnya struktur organisasi yang relevan dalam implementasi kebijakan. Struktur ini penting karena implementasi kebijakan seringkali berubah dan tidak selalu berjalan secara linear.
- 2) Pendekatan Prosedural dan Manajerial, Pendekatan ini fokus pada pengembangan proses dan prosedur yang tepat untuk implementasi kebijakan publik. Ini mencakup perencanaan, penjadwalan, Pengawasan dan pengelolaan kebijakan publik.
- 3) Pendekatan Perilaku, Pendekatan ini melibatkan analisis perilaku dalam mengelola masalah manajemen, yang sering diasosiasikan dengan pengembangan organisasi atau "organizational development".
- 4) Pendekatan Politik menekankan dinamika kekuasaan dan pola pengaruh yang ada dalam birokrasi organisasi. Pendekatan ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan terkait erat dengan dinamika kekuasaan dalam proses kebijakan publik yang lebih luas (Wahab, 2008).

Tujuan utama kebijakan publik pemerintah adalah untuk memantau bagaimana orang berinteraksi satu sama lain untuk meningkatkan organisasi, kenyamanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk menyusun artikel ilmiah tentang kebijakan tertentu, masukan sering

dikumpulkan dari sektor publik dan swasta oleh pemerintah dalam upaya mencapai tujuan ini. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tepat dan memberikan kontribusi terbaik untuk kesejahteraan masyarakat.

Beberapa badan atau birokrasi pemerintah bertanggung jawab melaksanakan kebijakan selama tahap implementasi melalui mobilisasi sumber daya teknis dan manajerial. Dalam proses ini, berbagai tindakan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam posisi ini, pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, penafsiran, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan menggunakan strategi ini, administrator dapat mengatur sumber daya, badan, dan teknologi yang membantu implementasi kebijakan.

Fase implementasi ini sangat penting dalam siklus kebijakan karena memfasilitasi hubungan yang baik antara pemerintah dan warga negara, serta memastikan bahwa tujuan dari kebijakan publik dapat tercapai dengan baik. Hasil akhir dari kegiatan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtias (2014) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan”

,Crinson dalam ayuningtias (2014) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik ataupun konkret, sehingga pendefinisannya akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lainya tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Menurut Friedrich dalam Agustino (2017) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang disusun oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Adson dalam Agustino (2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang bergabung dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan suatu kesatuan. Menurut Dun dalam

Ayuningtyas (2014) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbak balik dari tiga unsur yaitu kebijakan publik, perilaku dan lingkungan kebijakan.

Analisis kebijakan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik devinisi seperti ini maka analisis kebijakan merupakan kajian yang dapat diadopsi oleh institusi publik maupun privat. Analisis kebijakan mungkin masih amat jarang disebut sebagai sebuah profesi dinegeri ini. Sebutan analisis kebijakan memang baik jika itu menyebutkan sebuah keahlian yang disandang oleh seseorang. Tetapi, jika maksudnya membangun imej analisis kebijakan adalah sebuah profesi yang harus dihargai dengan uang, maka nampaknya itu telah bertentangan dengan etika dari analisis kebijakan itu sendiri. Analisis kebijakan menginginkan agar rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh kliennya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Study kebijakan publik didefinisikan sebagai studi tentang jenis dan karakteristik, sebab-sebab, dan akibat dari kebijakan publik. Secara sadar studi kebijakan publik bisa dibedakan menjadi 5 tipe yaitu:

1. Studi tentang sebab-sebab lahirnya kebijakan,
2. Studi tentang aktor kebijakan
3. Studi implementasi
4. Studi evaluasi

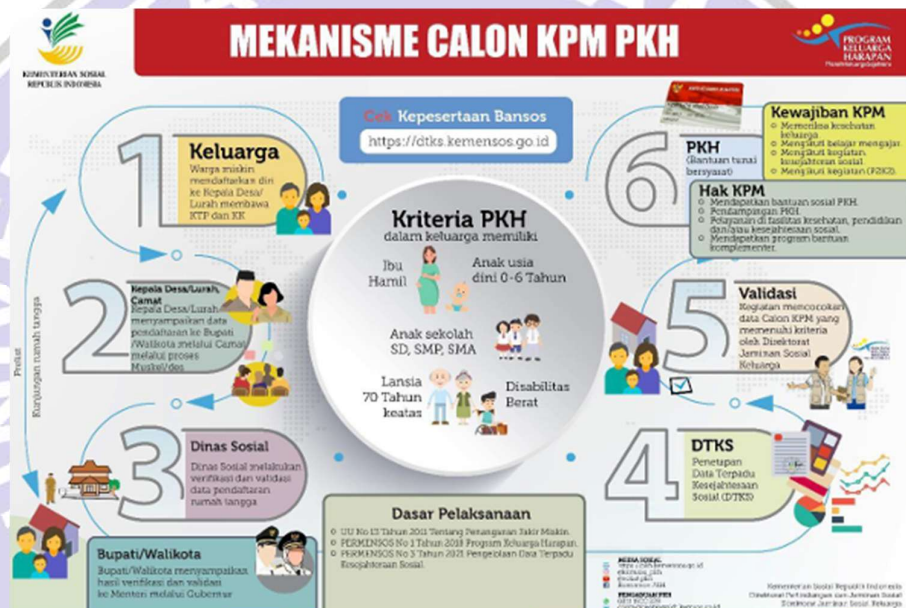
## 5. Analisis kebijakan

### 3. Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan fokus pada keluarga yang tergolong dalam kategori miskin dan rentan, dan sudah terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Tiga komponen utama membentuk program: kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan memiliki beberapa hak. Mereka dapat menerima bantuan sosial dari program, mendapatkan pendampingan sosial, dan menggunakan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang disediakan oleh program. Keempat, sesuai dengan kebijakan, mengikuti program bantuan tambahan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam situasi normal, KPM PKH memiliki tanggung jawab sebagai berikut: pertama, dalam komponen kesehatan, ibu hamil/nifas/menyusui dan anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatannya di fasilitas atau layanan kesehatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Kedua, dalam komponen pendidikan, anak-anak usia sekolah yang wajib belajar selama 12 tahun harus mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif. Ketiga, dalam komponen kesejahteraan sosial, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat harus mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan minimal setiap

tahun. Keempat, anggota KPM harus hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan. Kelima, semua anggota KPM harus memenuhi kewajibannya kecuali dalam keadaan memaksa (force majeure). Keenam, KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi, dan mekanisme sanksi akan dijelaskan lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan verifikasi oleh komite. Proses mekanisme calon penerima program keluarga harapan meliputi:



**Gambar 1.1 Mekanisme Calon KPM PKH**

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Kesejahteraan dapat diartikan sebagai kecukupan pemenuhan kebutuhan orang yang merasa sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas

yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang dan hatinya terpelihara, ia merasa keadilan ada dalam hidupnya dan ia merasa terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan terhindar dari bahaya kemiskinan yang mengancam. Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur perkembangan suatu bangsa. Tingkat kesehatan, pendidikan, perekonomian yang perlu diperhatikan.

Program PKH yang dicanangkan oleh pemerintah mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagi keluarga yang dalam keadaan kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang layak menjadi sebuah tantangan besar. Tingginya biaya transportasi, baik peralatan sekolah dan layanan kesehatan sering terlalu tinggi untuk mereka jangkau, terkadang yang menjadi alasan orang tua hanya membeli obat-obatan warung untuk anaknya ketika sedang sakit, namun hal ini justru berakibat pada jumlah kehadiran anak tersebut disekolah karena sakit yang tak kunjung sembuh berdampak pada kinerja anak sehingga memperkecil peluang untuk lulus, yang ada akhirnya membuat mereka terjebak dalam sebuah rantai kemiskinan.

Karena inilah pemerintah melalui Kemensos mengeluarkan sebuah program yang dinamakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai solusi dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang perlindungan sosial bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH sendiri merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung tunai kepada RTSM dengan

syarat dapat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan. Program ini sangat mulia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan kesehatan dan kesehatan dan gizi para peserta PKH sehingga dapat mengurangi beban RTSM dan diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan. Pengertian kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pasal 1 ayat (1): kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Dapat dipahami bahwa kesejahteraan merupakan peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga terpenuhi kebutuhan dasar dan menjadikan yang lebih baik dari sebelumnya.

#### **4. Aturan Penyalahgunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Menurut UU No. 13 Pasal 43 Ayat (1) Tahun 2011 "Setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang dananya dilindungi oleh UU dan berlaku bagi siapa saja (individu, pendamping, oknum) yang menyalahgunakan

dana tersebut, selain itu pemalsuan data verifikasi dan validasi juga diancam pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda Rp50 juta.

## **5. Evaluasi Penyalahgunaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)**

Penyalahgunaan dana sering disebabkan oleh kurangnya sosialisasi aturan program keluarga harapan (PKH) terhadap penerima manfaat bantuan, selain itu kebutuhan ekonomi yang mendesak serta pemantauan tidak rutin seperti P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang kurang maksimal juga menjadi faktor penyalahgunaan dana. Salah satu penyalahgunaan dana bantuan adalah judi online (judol) oleh penerima bantuan.

Dalam hal ini banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencegah penggunaan dana bantuan untuk hal-hal diluar konteks yang menghambat tujuan pengentasan kemiskinan seperti judi online (judol).

1. Verifikasi data penerima manfaat bantuan PKH
2. Peningkatan pemahaman oleh pendamping tentang aturan-aturan penerima manfaat bantuan PKH dan penggunaan dana bantuan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, pendidikan, gizi dan untuk pinjol, judi online (judol), atau kebutuhan gaya hidup lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian kualitatif yang ditandai dengan orientasi deskriptif. Sebagaimana diuraikan oleh Moleong (2010), metodologi ini merupakan penyelidikan ilmiah yang diarahkan untuk menjelaskan suatu fenomena, seringkali melibatkan prosedur analitis. Tujuan utamanya adalah untuk memahami situasi tertentu dalam kerangka sosial dengan memeriksa interaksi antara peneliti dan subjek yang diawasi.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pemanfaatan penelitian lapangan sebagai teknik pengumpulan data.

### **a. Observasi**

Observasi berfungsi sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian, yang melibatkan pengamatan langsung dan pencatatan subjektif terhadap fenomena. Para ilmuwan menggunakan observasi terstruktur, pendekatan sistematis terhadap pengumpulan data yang menentukan apa, kapan, dan di mana melakukan observasi. Metode ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat langsung dalam berbagai aktivitas untuk mengakses sumber data yang diperlukan. Dalam konteks penelitian ini, observasi difokuskan pada pengamatan langsung terhadap aktivitas pada lokasi penelitian..

### **b. Wawancara**

Wawancara dapat didefinisikan sebagai pertukaran pertanyaan dan jawaban antara beberapa individu. Mengenai metodologi wawancara, penting untuk digarisbawahi bahwa wawancara merupakan dialog yang bertujuan yang dilakukan oleh dua partisipan: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber, yang menanggapi pertanyaan yang diajukan. Tujuan utama dari interaksi tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi pengembangan wisata alam yang ada di kecamatan ngrayun khususnya pelaksanaan PKH di Desa Selur.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk meningkatkan bukti atau data yang dikumpulkan di lapangan dan untuk memperoleh pemahaman tentang subjek melalui bahan tertulis. Dokumen mencakup semua dokumentasi tertulis mengenai kejadian sebelumnya, terlepas dari tujuan awalnya untuk tujuan penelitian. (Ghony & Almanshur, 2012). Selain itu, ini berfungsi sebagai ringkasan atau log terperinci dari catatan ekstensif dan alat bantu visual, seperti gambar atau foto, yang melengkapi data yang diperoleh oleh para peneliti.

### 3. Teknik Penentuan Informan

Metode pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, sebagaimana yang dijabarkan oleh Sugianto dalam buku *Understanding Qualitative Research*. Menurut Sugianto,

"Purposive sampling merupakan teknik pemilihan sumber data berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut dapat berupa individu yang dianggap memiliki pengetahuan paling banyak tentang pokok bahasan yang diteliti, atau mereka yang memiliki posisi berwenang yang memudahkan peneliti dalam menyelidiki objek atau konteks sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti diidentifikasi sebagai individu yang paling mahir dalam memberikan informasi penting kepada peneliti..

Informan Individu yang memberikan informasi adalah titik fokus penyelidikan yang bertujuan untuk memperoleh asal data. Sebagaimana dibuktikan oleh sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini, informan. Dengan demikian, informan yang dipertimbangkan adalah seperti yang tercantum di bawah ini.:

1. Kepala Desa Selur, Kecamatan Ngrayun Kab Ponorogo
2. Sekretaris Desa Selur, Kecamatan Ngrayun Kab Ponorogo
3. Masyarakat penerima PKH

#### **4. Teknik Analisa Data**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis data., di mana data tersebut disusun secara sistematis dan ditinjau secara komprehensif. Metodologi deskriptif kualitatif melibatkan deskripsi terperinci dari data yang dikumpulkan secara lengkap yang berkaitan dengan skenario dunia nyata. (Moleong, 2021). Milles dan Huberman mengusulkan urutan fase dalam analisis data kualitatif,

termasuk pengurangan data, presentasi data, dan kesimpulan derivatif (Miles et al., 2014).

#### 1) Pengumpulan Data

Prosedur menyiapkan dan mengatur data untuk analisis meliputi kegiatan seperti duplikasi wawancara, mendigitalkan dokumen, menyalin data lapangan, dan mengklasifikasikan data ke dalam berbagai kategori sesuai dengan sumber informasinya.

#### 2) Reduksi data

Pengurangan data adalah teknik yang digunakan dalam analisis untuk mengkategorikan, memprioritaskan, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan menyusun data yang telah diringkas untuk menawarkan penggambaran yang lebih terfokus dari hasil pengamatan dalam kerangka kerja tertentu.

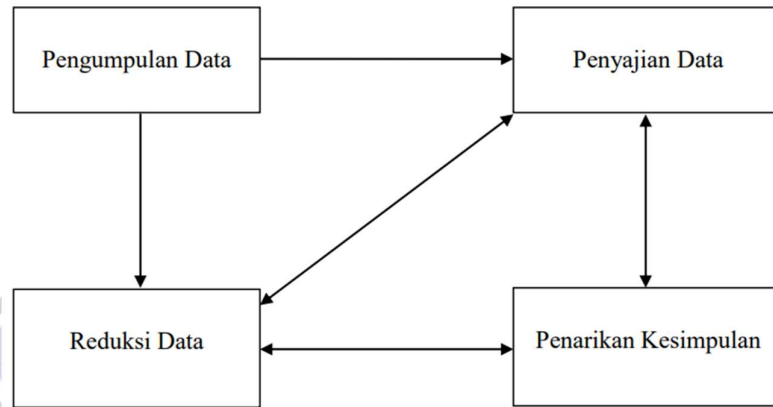
#### 3) Penyajian Data

Representasi data melibatkan pemeriksaan informasi melalui berbagai format seperti matriks, jaringan, bagan, atau grafik. Dalam penelitian kualitatif, data biasanya disajikan menggunakan deskripsi ringkas, Tabel, dan koneksi di antara kategori yang berbeda.

#### 4) Penarikan Kesimpulan

Tindakan menyimpulkan memerlukan prosedur memperoleh kesimpulan dan memvalidasi kesimpulan tersebut. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat diubah tanpa adanya bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam

penelitian kualitatif, kesimpulan yang dibuat memiliki kemampuan untuk mengatasi pernyataan masalah asli.



**Gambar 1.2 Mekanisme Penyimpulan Data**

Sumber: Miles, M. B., Huberman, (2014)

Keterangan Gambar :

1. Pengumpulan Data adalah metodologi yang digunakan untuk memperoleh data.
2. Penyajian Data mengacu pada penyusunan data yang terorganisasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan wawasan ke dalam berbagai tindakan.
3. Reduksi Data melibatkan proses penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Pengumpulan Data Penyajian Data Reduksi Data Penarikan Kesimpulan
4. Penarikan Kesimpulan melibatkan aktivitas menafsirkan dan mencatat pola, keteraturan, dan penjelasan yang mungkin ada atau disimpulkan.